

# Akseptabilitas Pemangku Kebijakan dalam Implementasi Program Penyediaan Makanan Tambahan Anak Sekolah Kabupaten Kulon Progo

Safira Ainun Ulumiyah<sup>1</sup>, Andi Yuniarsy Hartika<sup>2</sup>, BJ Istiti Kandarina<sup>3</sup>

<sup>1</sup> Puskesmas Kota Batu Malang

<sup>2</sup> Universitas Borneo Tarakan

<sup>3</sup> Universitas Gadjah Mada

e-mail: [yuniarsyhartika@borneo.ac.id](mailto:yuniarsyhartika@borneo.ac.id)

## Article Info

### Article history:

Received 01 Januari 2023

Revised 10 Januari 2023

Accepted 14 Januari 2023

### Keyword:

Akseptabilitas

PMT AS

Kabupaten Kulon Progo

## ABSTRAK

Pemerintah meluncurkan program Pemberian Makanan Tambahan Anak Sekolah (PMT AS) untuk memenuhi kebutuhan energi anak sekolah secara nasional. Pada tahun 2018, Kabupaten Kulon Progo melaksanakan program PMT AS yang bersumber dana dari APBD Kabupaten Kulon Progo di 6 sekolah dasar. Dalam sebuah program baru, indikator implementasi utama yang penting untuk dievaluasi salah satunya adalah akseptabilitas. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Pemilihan informan menggunakan teknik *purposive sampling*. Pengumpulan data dilakukan dengan metode *in-depth interview* dan *focus group discussion*. Keabsahan data dilakukan dengan cara triangulasi sumber, *member checking*, dan *peer debriefing*. Akseptabilitas pemangku kebijakan Kabupaten Kulon Progo terhadap program PMT-AS ini baik, mereka mendukung dan berkomitmen penuh dalam melaksanakan program ini, dibuktikan dengan adanya persetujuan program, anggaran, dan dibentuknya tim pelaksana program.



©2022 Authors. Published by PT. LARPA JAYA PUBLISHER. This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License. (<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>)

## PENDAHULUAN

Pemerintah meluncurkan program Pemberian Makanan Tambahan-Anak Sekolah (PMT-AS) untuk memenuhi kebutuhan energi anak sekolah secara nasional pada tahun 1997. Program PMT-AS pada tahun 1997 menjangkau desa miskin di 27 provinsi dengan jumlah penerima program sebanyak 7,3 juta anak. Program PMTAS diluncurkan dalam rangka percepatan pencapaian tujuan pembangunan nasional yang terkait dengan: pengentasan gizi buruk, mencapai pendidikan untuk semua, dan pengentasan kemiskinan (Lestari, 2013). Program PMT-AS ini dimaksudkan untuk memberikan 15 persen Asupan Gizi Harian yang Dianjurkan (RDA) dari kalori (300 kalori) dan 10 persen RDA dari protein (5 gram) melalui makanan tambahan yang disiapkan oleh petugas sekolah dan anggota masyarakat setempat (Kartono et al., 2013). Maksud dari pemberian PMT-AS juga untuk memaksimalkan pemanfaatan makanan lokal di suatu daerah. Partisipasi masyarakat diharapkan meningkat untuk pelaksanaan implementasi yang optimal. Selain itu, PMT-AS dalam prosesnya akan membentuk karakter anak serta meningkatkan pengetahuan dan praktik kesehatan melalui pendidikan gizi dan kesehatan (Iswarawanti et al., 2016).

Pada tahun 2018, Kabupaten Kulon Progo melaksanakan program PMT-AS yang bersumber dana dari APBD Kabupaten Kulon Progo di 6 Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah Kecamatan Kokap. Dinas Sosial Kulon Progo di bawah Bidang PPPA melaksanakan program PMT-AS pada Agustus 2018 hingga Desember 2018 yang berdasar pada Peraturan Bupati Kulon Progo nomor 18 tahun 2018 tentang perubahan peraturan bupati Kulon Progo tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan PMT-AS (Dinas Sosial Kabupaten Kulon Progo, 2018).

Program PMT-AS di Kabupaten Kulon Progo diluncurkan di tiga desa di Kecamatan Kokap dengan alokasi Program PMT-AS yaitu 342 siswa sasaran di 6 sekolah penerima program dengan biaya makan per siswa sebesar Rp. 8000,00 yang diberikan selama 90 hari efektif (1 Agustus s.d. 10 Desember 2018). Program PMT-AS berbasis makanan ini adalah pertama kali dilakukan di Kabupaten Kulon Progo, pada tahun sebelumnya PMT-AS yang diberikan berupa snack/kudapan (Dinas Sosial Kabupaten Kulon Progo, 2018).

Program PMT-AS tahun 2018 ini merupakan program baru dimana yang diberikan adalah berupa makanan lengkap. Menurut studi pendahuluan yang dilakukan peneliti, implementasi program PMT-AS berbasis makanan lengkap berbeda dari implementasi program PMT-AS berbasis kudapan. Biaya yang dikeluarkan juga berbeda sehingga perlu dilihat bagaimana penerimaan para pemangku kebijakan terhadap anggaran penyelegaraan program ini serta dukungan pemangku kebijakan terkait pelaksanaan program ke depannya. Penerimaan atau persetujuan para pemangku kebijakan ini merupakan hal yang sangat penting dalam pelaksanaan suatu program, jika suatu program tidak mendapatkan persetujuan dari pemangku kebijakan maka program intervensi tersebut tidak berjalan dengan baik karena tidak ada komitmen yang baik untuk melaksanakan program (Northridge et al., 2018).

Manfaat evaluasi implementasi program yaitu selain untuk menilai kualitas hasil dari implementasi sebuah program, hasil dari evaluasi tersebut bisa digunakan untuk menentukan strategi untuk program selanjutnya agar program intervensi yang dilakukan lebih baik dari segi pelaksanaan hingga kualitas pelayanan yang dihasilkan. Dalam sebuah program baru, outcome implementasi utama yang penting untuk dilihat salah satunya adalah akseptabilitas. Dari hal tersebut peneliti tertarik untuk mengevaluasi implementasi pelaksanaan program PMT-AS secara kualitatif di Kecamatan Kokap Kabupaten Kulon Progo dalam aspek akseptabilitas pemangku kebijakan.

## METODE PENELITIAN

Untuk menentukan arah dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode kualitatif. Pendekatan kualitatif dalam penelitian ini adalah menggunakan studi kasus menggali pokok permasalahan dari informan yang terlibat secara langsung melalui *in-depth interview* dan FGD. Penelitian dilaksanakan di daerah Kulon Progo tepatnya di Sekolah Dasar penerima program PMT-AS di kecamatan Kokap pada bulan Maret-April 2019 setelah *ethical approval* diterbitkan oleh Komisi Etik Fakultas Kedokteran Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan Universitas Gadjah Mada. Sekolah penerima program PMT AS di Kabupaten Kulon Progo adalah SDN Clapar, SDN Jeruk, SDN Tegiri, SDN Kriya, SDN Plampang, MI Ma'arif Sangon.

Penentuan informan dengan teknik *purposive* tidak berdasarkan atas strata, kedudukan, pedoman, atau wilayah tetapi berdasarkan pada adanya tujuan dan pertimbangan tertentu yang tetap berhubungan dengan permasalahan penelitian. Informan yang akan diteliti, yaitu: Bupati Kulon Progo sebagai pembuat kebijakan, Kepala Bidang PPPA Dinas Sosial Kabupaten Kulon Progo sebagai penanggung jawab kegiatan PMT AS dan Kepala Seksi Peningkatan Kualitas Hidup Anak sebagai pelaksana teknis kegiatan PMT AS, Kepala Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter SDM sebagai pelaksana teknis PMT AS, Kepala Sekolah penerima program PMT AS sebagai penanggung jawab pelaksanaan kegiatan PMT AS di sekolah.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil dari transkripsi yang didapatkan pada saat *in-depth interview* dan FGD kemudian dilakukan koding dan dikategorikan, dan dapat dilihat pada Tabel 1 berikut .:

**Tabel 1 Koding Subkategori Akseptabilitas**

Koding	Subkategori	Kategori
- Persetujuan program intervensi	Penerimaan persetujuan pemangku kebijakan	Dukungan terhadap program PMT-AS
- Persetujuan Anggaran		
- Pembentukan tim koordinasi PMT-AS	Komitmen	
- Penggalangan multisektoral		

- Penentuan Kecamatan penerima Program	Komitmen penuh pada
- Persetujuan usulan sekolah penerima program	pelaksanaan program
- Validasi jumlah penerima program	
- Persetujuan kepala sekolah penerima program	
- Sosialisasi kepada sekolah penerima program	
- Pelatihan terhadap petugas administrasi dan pemasak	
- Sosialisasi kepada orangtua penerima program PMT-AS	Akseptabilitas
- Monitoring yang dilaksanakan oleh pemangku kebijakan (multisektoral dari PKK Kecamatan, Dinas Terkait, dan Puskesmas)	
- Sinergi program terhadap visi misi kepala daerah	-Faktor Pendukung -akseptabilitas pemangku kebijakan
- Ketepatan intervensi terhadap masalah yang ada	
- Lokasi sekolah jauh dari pusat kota	Faktor penghambat
- Beban kerja ASN berlebih	monitoring program

Persetujuan pemangku kebijakan atau akseptabilitas pemangku kebijakan merupakan tahap paling awal dalam pelaksanaan program intervensi. Persetujuan pemangku kebijakan disini berupa persetujuan intervensi yang akan diberikan, persetujuan anggaran yang digunakan, dan persetujuan sasaran penerima program. Persetujuan dari pemangku kebijakan melalui berbagai tahap mulai dari rapat kerja DPR hingga penggalangan komitmen multisektoral. Berikut adalah pernyataan informan penelitian:

*“pemberian makanan tambahan untuk anak sekolah itu satu program yang sudah sekian lama dan sudah rutin sudah beberapa tahun ini, sehingga proses itu berjalan secara normatif kemudian dibahas di paripurna DPR, di rapat kerja DPR dan yang mengusulkan itu dari dinas sosial kemudian dinas pendidikan yang punya siswa di sekolah itu, sebagai sumber datanya ada berapa siswa atau sekolah yang dapet itu. kemudian kita usulkan. akhirnya usulan itu memang harus ridgid ya by name by addres itulah proses untuk membuat suatu kebijakan sampai akhirnya ditetapkan dalam bentuk peraturan daerah namanya APBD murni atau dalam APBD perubahan” - HW*

Menurut informan pemberian PMT AS memang merupakan program rutin yang diberikan oleh pemerintah kabupaten Kulon Progo kepada anak sekolah. Program ini kemudian diusulkan untuk dibahas dalam sidang paripurna DPR untuk ditetapkan dalam APBD. Tahap selanjutnya yaitu penggalangan dukungan dan komitmen multisektoral dari berbagai Dinas dan Perangkat Pemerintahan lainnya agar program PMT-AS berjalan dengan baik. Sebuah program yang mendapatkan dukungan dari berbagai sektor yang ahli dalam bidangnya akan meningkatkan keberhasilan program. Berikut adalah penjelasan informan terkait proses perencanaan dan penggalangan dukungan multi sektoral:

*“jadi untuk perencanaan itu ada musenbang, musyawarah yang kita mulai dari OPD-OPD mulai dari desa, kecamatan dan semua dinas-dinas. Jadi semua itu terlibat. Makanya penyusunan rencana itu pasti di exspos dulu. Bahkan tidak hanya dinas, pasti kita publikasikan di depan publik hearing supaya terbuka dalam konsep perencanaannya. Nanti ada OPD khusus setelah disampaikan kepada semua OPD bahkan masyarakat. Masyarakat kita undang secara resmi untuk publik hearing. Tokoh-tokoh masyarakat kita undang, dewan pendidikan, dewan kebudayaan yang anggotanya juga masyarakat. Kemudian setelah disepakati mengerucut disepakati menjadi suatu program baru opd yang terkait baru berkoordinasi, dalam hai ini ada Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, fokus kesitu karena untuk mempercepat pengentasan kemiskinan. Indikator kemiskinan itu salah satunya adalah konsumsi. Kecukupan*

*asupan kalori dan nutrisi, sehingga dengan pemberian PMT ini harapannya kecukupan kalori ini terpenuhi” - HW*

Berdasarkan informan di atas perencanaan dimulai dari musyawarah antar elemen masyarakat melalui Musrenbang. Kemudian disepakati untuk menjadi sebuah program pemerintah untuk fokus dalam mempercepat pengentasan kemiskinan. Untuk memperkuat adanya dukungan dan komitmen dari sektor lain maka dibuat surat keputusan atau surat perintah mengenai susunan tim dalam pelaksanaan program. Dalam program PMT-AS ini dibentuklah tim koordinasi berdasarkan Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kulon Progo Nomor 280 tahun 2018 tentang pembentukan tim koordinasi Penyediaan Makanan Tambahan Anak Sekolah (PMT-AS) tahun 2018. Berikut pernyataan informan dari Dinas Sosial Kabupaten Kulon Progo:

*“Tadi itu yang dari berita acara kami kumpulkan tanda tangan yang berkompeten, dari kepala dinas juga, dari Dinas Pendidikan, setelah itu kami sampaikan ke bagian hukum dengan draft ada surat keputsan untuk penunjukan lokasi dan alokasi SD-SD yang mau dikasih, jadi lokasi mana, muridnya yang sudah fix berapa, dananya berapa, kita sudah ada SKnya” - LS*

Dari pernyataan informan di atas selain penggalangan dukungan dan komitmen dari Dinas-dinas terkait kemudian dilegalkan melalui penerbitan SK termasuk alokasi sekolah penerima program PMT AS ini. Penggalangan dukungan juga dilakukan kepada masyarakat agar program PMT-AS dikenal oleh masyarakat, mendapatkan dukungan penuh, dan bisa berjalan dengan lancar. Informan menambahkan bahwa selain berdasarkan SK juga harus ada partisipasi juga dari masyarakat melalui pemberdayaan. Pemberdayaan masyarakat melibatkan masyarakat sekitar termasuk wali murid dis ekolah penerima program PMT AS tersebut. Berikut pernyataan informan:

*“Sebelum pelaksanaan memang ada pemberdayaan masyarakat juga, kepala sekolah memang harus membentuk tim disitu ada sknya juga, beranggotakan anggota komite sekolah, masyarakat sekitar juga, dan nanti kepala sekolah harus mengadakan sosialisasi ke wali murid juga kalau akan ada pemberian makanan tambahan” – LS*

Tahap selanjutnya adalah persetujuan anggaran yang akan dikucirkan untuk pelaksanaan program PMT AS ini. Setelah mendapatkan anggaran dari APBD kemudian dana didistribusikan kepada sekolah penerima PMT AS melalui Dinas Sosial. Berdasarkan pernyataan informan di atas, anggaran yang dikeluarkan memang tidak sebesar yang diajukan. Hal ini karena anggaran yang digunakan sebagian dipangkas untuk mendukung pembangunan bandara NYIA. Namun, hal tersebut tidak mengurangi efektifitas pelaksanaan program tersebut. Dari anggaran sebesar Rp. 8000,00 sudah dapat mencukupi kebutuhan kalori dan kecukupan gizi anak sekolah.

Pembentukan tim koordinasi PMT-AS merupakan hasil kesepakatan bersama antar OPD terkait dengan berdasarkan SK yang telah ditetapkan. Tim ini kemudian yang akan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan program PMT AS ini. Berikut penjelasan beberapa informan terkait pembentukan tim koordinasi Program:

*“setelah disepakati mengerucut disepakati menjadi suatu program baru OPD yang terkait baru berkoordinasi, dalam hal ini ada dinas sosial, dinas kesehatan, dinas pendidikan, fokus kesitu” – HW*

Penentuan Kecamatan penerima Program PMT AS dilakukan melalui rapat koordinasi antar OPD. Penentuan tersebut berdasarkan penilaian terhadap kecamatan paling miskin di wilayah Kulon Progo. Kabupaten Kulon Progo memiliki PAD paling rendah jika dibandingkan dengan kabupaten lain di Propinsi DIY. Berikut adalah pernyataan informan dari Dinas Sosial Kabupaten Kulon Progo.

*“Nah Untuk Kulon Progo karena kita daerah yang bisa dikatakan dari lima daerah di DIY Kulon Progo adalah daerah yang paling miskin. PAD nya paling rendah, kondisinya sangat terbatas. angka kemiskinan tertinggi, Jadi kalau dengan Kabupaten Gunung Kidul itu kita saling bersaing dalam hal kemiskinan. Tapi masalahnya sekarang Gunung Kidul itu mereka*

*bisa cepet naik karena masyarakatnya itu gigih kemudian juga banyak dukungan kesana ya karena tadinya memang paling miskin, jadi semua bantuan banyak ke arah sana dan ndilalah masyarakatnya juga lebih gigih daripada di Kulon Progo. Nah Daerah Kulon Progo ini kan sebenarnya daerah kaya, namun karena terlena karena kekayaan alam nya mereka jadi tidak begitu kreatif. Orang kan akan lebih kreatif ketika menemui masalah atau kendala, kalau gak ada kan apa adanya dinikmati. Nah sehingga PMT AS ini harapannya dari pemerintah Kulon Progo memang kita punya kebijakan diberikan untuk masyarakat yang tidak mampu. Akhirnya kita mengacu pada daerah yang memiliki angka kemiskinan tertinggi. Untuk kemiskinan tertinggi kebetulan ada di Kokap dan itu juga mengacu pada peraturan bupati tentang indikator daerah daerah yang memiliki keluarga miskin yang menjadi dasar kita dalam menentukan wilayah mana saja yang akan mendapatkan bantuan PMT-AS ini. Jadi kebetulan karena kebetulan angka kemiskinan tahun lalu tertinggi ada di Kokap jadi kita fokuskan semua kesana” - HW*

Persetujuan usulan sekolah penerima program ditetapkan oleh Dinas Sosial Kabupaten Kulon Progo melalui musyawarah dengan OPD terkait. Hal ini dilakukan karena pengawal anggaran untuk program ini dipegang oleh Dinas Sosial. Diharapkan pemberian bantuan tersebut dapat terserap dengan baik. Berikut pernyataan beberapa informan terkait penentuan sekolah penerima program:

*“Sebenarnya kan gini, ketika kita sudah menentukan berdasarkan kebijakan kulon progo tentang daerah miskin tadi, kita sudah menentukan kokap, tentunya kita bekerja sama dengan kecamatan, dengan dikpora, sehingga kita sudah menentukan dari masukan dan data data mereka, sekolah mana yang layak untuk menerima bantuan pmt as. Tapi untuk jumlahnya, kuotanya itu tentunya yang menentukan kita. Jumlahnya kita menyesuaikan dengan anggaran yang ada di kita, kemudian dibagi nanti beberapa sekolah yang layak untuk menerima bantuan pmtas ini. Jadi kita kerjasama tidak menentukan sendiri, kita dibantu dinas pendidikan yang punya sekolah- sekolah itu” - WKA*

*“wilayah yang ditunjuk itu diharapkan adalah kecamatan kokap, karena kokap merupakan kecamatan kecamatan yang paling miskin dibanding dengan 12 kecamatan yang lain. Maka orientasinya yang dulu itu di 3 kecamatan yang tahun sebelumnya kemudian tahun 2018 difokuskan di kokap yang paling miskin dibanding dengan 12 kecamatan yang lainnya. Maka dipilihlah Kokap saja seperti itu jadi 6 sekolah itu” – PYN*

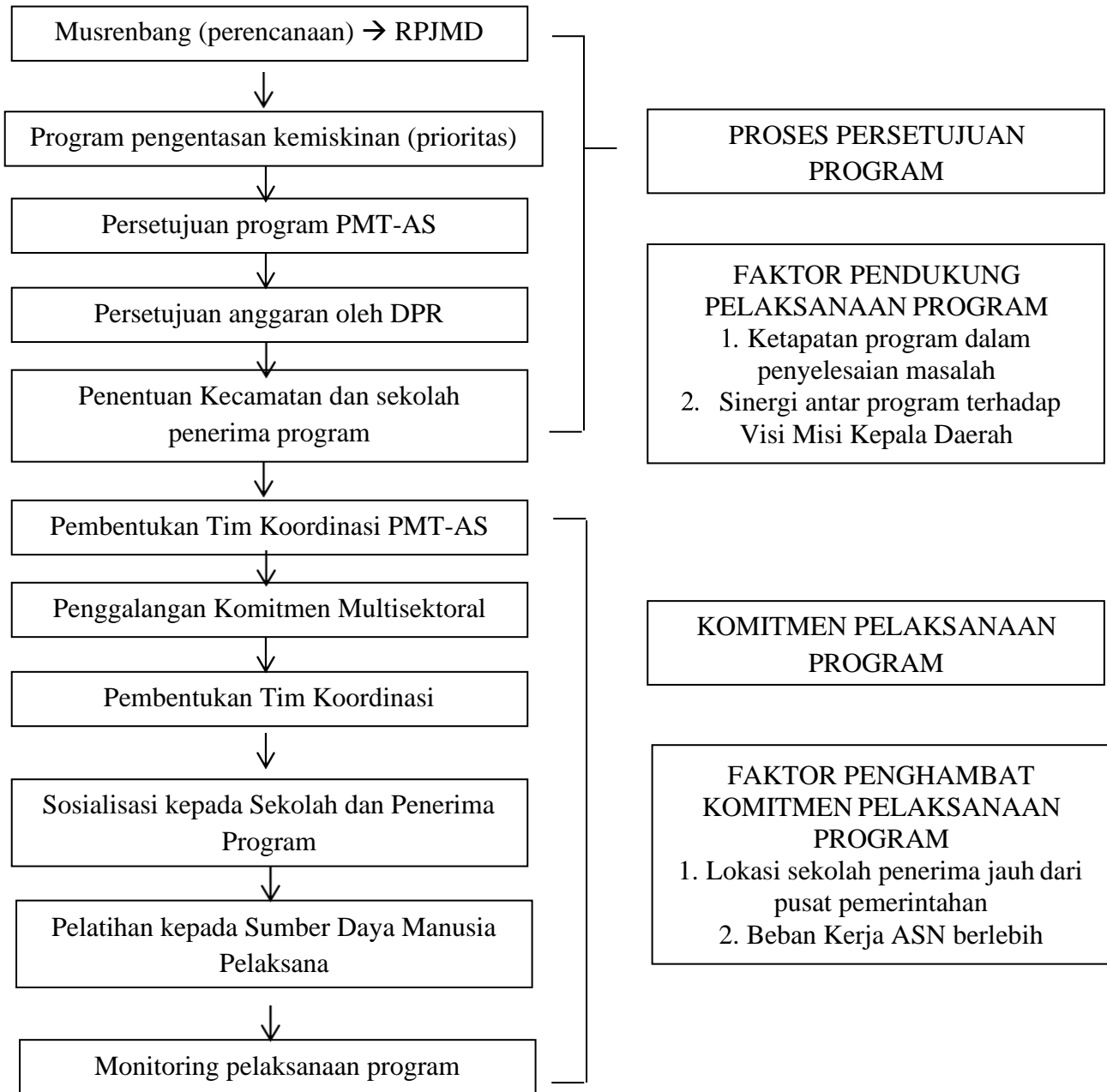
Dari kutipan wawancara di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa penentuan sekolah penerima bantuan PMT AS ini melibatkan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kulon Progo. Hal ini dilakukan karena DIKPORA yang memiliki data sekolah dan data siswa di seluruh kabupaten Kulon Progo. Kemudian Dinas Sosial akan menetapkan kuota sekolah penerima program PMT AS ini.

Untuk validasi jumlah penerima program menyesuaikan dengan anggaran yang ada, kemudian memperhatikan jumlah kuota sekolah penerima program. Dinas Pendidikan kemudian mengusulkan sekolah yang layak untuk menerima bantuan PMT AS tersebut untuk kemudian di saring oleh Dinas Sosial untuk menentukan jumlah anak penerima PMT AS ini. Berikut adalah kutipan wawancara beberapa informan terkait:

*“Jadi gini mbak, kenapa kita menentukan karena kita harus ada payung hukumnya, dari permendagri, perbub, turun lagi ada juknisnya pk22, nanti juga ada sk tim nya kami khususnya meliputi semuanya, kita menentukan siswa-siswa yang miskin misalkan bdt, karena kami juga harus tepat sasaran karena kita juga dari dinas sosial juga harus menegentaskan kemiskinan. Kalau yang tahun lalu ada sd jeruk, celapar. Kami kemarin (2018) cuma 6 sd karena keterbatasan dana juga” - LS*

“Karena yang punya sekolah punya anak-anak sekolah itu kan dinas pendidikan maka diharapkan memang sekolah mana yang perlu diajukan dengan 352 anak yang kita tahu ini dengan pemberian makanan tambahan maka kita carikan sekolah-sekolah yang mungkin dikatakan miskin yang berdasarkan hasil yang di bawah dengan yang lainnya maka kita cari sekolah yang yang nilainya paling rendah yang paling luar dari Kecamatan tersebut yang sulit dijangkau seperti itu” – PYN

“Anggaran dinas sosial kan sekitar 246 sekian juta, saya lupa ketika dibagi 8 itu kan ketemu 352 siswa. Pagunya itu tiap anak dianggarkan Rp8.000. Kita punya sekolah-sekolah yang pinggirannya reng-ringan kita itu ada 8, 8 itu. ini kita rangking daerah paling sulit ada yang paling luar dan sebagainya” – PYN



Gambar 1 Kesimpulan Pernyataan Informan terkait Aspek Akseptabilitas

PMT-AS berbasis makanan lengkap di Kabupaten Kulon Progo ini diluncurkan pada tahun 2018. PMT-AS di Kulon Progo yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial sejak tahun 2014. Pembiayaan PMT-AS berasal dari APBD Kabupaten Kulon Progo. Sejak tahun 2014-2017 PMT-AS yang diberikan oleh Dinas Sosial berbasis kudapan/snack. Implementasi penyelenggaraan PMT-AS berbasis makanan lengkap berbeda dengan PMT-AS berbasis kudapan/snack. Penelitian ini berfokus terhadap *acceptability* atau akseptabilitas para pemangku kebijakan dan pelaksana kegiatan karena akseptabilitas merupakan elemen penting pada tahap awal pelaksanaan implementasi suatu program kesehatan. Akseptabilitas juga berperan dalam proses perjalanan program serta keberlanjutan program kedepannya. Akseptabilitas merupakan persepsi penerimaan dan persetujuan pemangku kebijakan terhadap program yang akan dilaksanakan. Termasuk faktor-faktor yang mempengaruhi akseptabilitas pemangku kebijakan seperti apakah program tersebut sesuai dengan anggaran yang tersedia, apakah program tersebut penting untuk dilakukan, apakah program yang diberikan bisa mencapai tujuan yang telah ditetapkan, apakah program tersebut bisa dilaksanakan di setting/wilayah penerima program (Bottorff *et al.*, 2017). Akseptabilitas stakeholder yang rendah menyebabkan program tersebut tidak berjalan dengan baik karena sejak awal dukungan terhadap berlangsungnya program rendah sehingga komitmen pelaksanaan program juga rendah. Selain itu jika sejak awal akseptabilitas stakeholder tidak ada maka keberlanjutan program dipastikan juga terhambat (Hirsch-moverman *et al.*, 2017).

Proses tahap awal program ini adalah persetujuan APBD oleh anggota dewan Kabupaten Kulon Progo terkait anggaran program. Beberapa tahun terakhir ini Kabupaten Kulon Progo sedang ada pembangunan Bandara NYIA (New Yogyakarta International Airport) yang bersumber dana dari APBD sehingga penggunaan anggaran dana harus diatur sedemikian rupa agar bisa mencakup program-program yang telah disusun sebelumnya.

Perencanaan kegiatan PMT-AS ini tidak serta merta muncul begitu saja. Perencanaan program di suatu daerah masuk dalam rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Kulon Progo tahun 2018. Penyusunan rencana ini dilakukan dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, pengelolaan pembangunan, pelayanan masyarakat, dan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Penyusunan rencana ini juga berkaitan dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode satu tahun. Penetapan RKPD dimaksudkan untuk mengintegrasikan, menciptakan keterpaduan, keserasaan, dan menyinergikan program-program pembangunan Daerah. RKPD yang ditetapkan bertujuan sebagai kerangka acuan bagi penyusunan Kebijakan Umum Anggaran serta penyusunan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Penyusunan RKPD didahului oleh evaluasi hasil pelaksanaan RKPD tahun sebelumnya, capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan, prioritas dan sasaran pembangunan daerah. PMT-AS di Kabupaten Kulon Progo merupakan sebuah program yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial di bawah Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Peluncuran program PMT-AS oleh Dinas Sosial di bawah Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ini berkaitan dengan Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. PMT-AS merupakan program yang bertujuan untuk memenuhi hak anak agar bisa mengikuti pendidikan dengan baik dan mendapatkan status kesehatan yang optimal. Perencanaan sebuah program di Dinas Pemerintahan selalu beracuan kepada Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang dimiliki oleh dinas masing-masing (Bupati Kulon Progo, 2018).

Para pemangku kebijakan setuju dengan penyelenggaraan PMT-AS berbasis makanan lengkap karena dari segi gizi lebih lengkap daripada PMT-AS berbasis kudapan. Selain itu PMT-AS berbasis makanan lengkap memberikan kesempatan bagi peserta didik untuk mengonsumsi makanan yang beragam. Pemberian PMT-AS bertujuan untuk mengurangi angka absen siswa, meningkatkan konsentrasi, dan meningkatkan perolehan nilai siswa di sekolah. Pemberian PMT-AS berbasis makanan lengkap selain untuk memenuhi kebutuhan kalori anak usia sekolah juga secara tidak langsung juga memberikan edukasi bagaimana gizi seimbang yang harus dikonsumsi setiap harinya dan pendidikan karakter seperti berdoa sebelum dan sesudah makan, mencuci tangan sebelum makan, tertib antri, serta mempersiapkan dan membersihkan peralatan makan sendiri. Kegiatan PMT-AS dilaksanakan selama 90 hari sehingga diharapkan contoh yang diberikan menjadi kebiasaan oleh

penerima program yaitu siswa dan orang tua siswa (Tanaka & Miyoshi, 2012).

Akseptabilitas pemangku kebijakan tidak hanya sampai persetujuan intervensi yang dilakukan dan persetujuan anggaran dana, tetapi juga persetujuan dan dukungan dari multisektor sehingga program bisa berjalan dengan baik (Sekhon *et al.*, 2017). Dukungan dari multisektor untuk menjalankan program PMT-AS ini didapatkan, namun komitmen pelaksanaan kurang maksimal karena aparatur sipil negara yang ditugaskan dalam kegiatan ini tidak hanya memegang program PMT-AS saja tapi mereka juga melakukan kegiatan lain sehingga beban kerja mereka bertambah.

Dukungan multisektor dalam mendukung pelaksanaan Program PMT AS sudah cukup bagus namun kurang optimal dalam pelaksanaan program. Pelaksanaan program disebut optimal apabila program yang disusun dapat terealisasi baik. Implementasi kebijakan itu dikatakan berhasil apabila ada kerja sama yang baik dari seluruh perangkat organisasi tersebut, karena suatu kebijakan yang melibatkan beberapa lembaga atau organisasi dalam proses implementasinya. Sehingga diperlukan koordinasi yang efektif antar lembaga lembaga terkait yang mendukung keberhasilan suatu program. Koordinasi merupakan hal yang penting dilakukan, Koordinasi dilakukan Pemerintah dan pemangku kepentingan untuk menyamakan setiap keputusan agar tidak mengalami benturan atau inkonsistensi dalam menjalankan kebijakan tersebut. Koordinasi yang dilakukan oleh tim yang dibentuk oleh Dinas Sosial melalui Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kulon Progo Nomor 280 tahun 2018 tentang pembentukan tim koordinasi Penyediaan Makanan Tambahan Anak Sekolah (PMT-AS) tahun 2018 dilakukan melalui aplikasi perpesanan yaitu *Whatsapp Messenger*. Dikarenakan lokasi sekolah penerima program jauh dari pusat kota/pemerintahan, penggunaan aplikasi perpesanan ini cukup membantu koordinasi pelaksana kegiatan terutama dalam bidang pengawasan karena pesan yang dikirimkan bisa langsung sampai dan bisa segera ditindaklanjuti. Dengan memanfaatkan aplikasi perpesanan seperti *whatsapp messenger*, kegiatan monitoring dan evaluasi menjadi lebih efektif dan masalah yang muncul segera ditindak lanjuti sehingga meminimalisir adanya kesalahan fatal dalam pelaksanaan program. Penggunaan aplikasi perpesanan ini bertujuan untuk memaksimalkan kegiatan monitoring dan evaluasi secara langsung yang terkendala oleh beban tugas pegawai dan lokasi sekolah yang jauh dari pusat pemerintahan (Sakona *et al.*, 2017). Selain pemantauan dan pendampingan melalui aplikasi perpesanan, kegiatan monitoring juga dilakukan secara langsung oleh pemangku kebijakan. Monitoring dan evaluasi bertujuan untuk, memastikan kelancaran pelaksanaan program, memastikan program intervensi tepat sasaran, memastikan pelaksanaan sudah sesuai dengan SOP yang diberikan, menilai apakah program tersebut berkontribusi terhadap tujuan awal program (Fritz *et al.*, 2017).

Salah satu kendala dalam pelaksanaan program PMT AS di kabupaten Kulon Progo adalah tidak optimalnya peran pelaksana kegiatan yang disinyalir akibat beban kerja yang sangat tinggi. Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 12 Tahun 2008 Tentang pedoman analisis beban kerja di lingkungan Departemen dalam negeri dan pemerintah daerah menyebutkan jam kerja efektif PNS untuk 5 hari kerja adalah 5 jam 30 menit per hari dan jam kerja efektif PNS untuk 6 hari kerja adalah 4 jam 40 menit. Sementara lokasi sekolah penerima PMT AS sangat jauh dari pusat pemerintahan, hal ini berdampak pada tidak maksimalnya pengawasan dan monitoring kegiatan di lapangan .

Dalam Pelaksanaan PMT-AS Di Kabupaten Kulon Progo dasar hukumnya adalah Peraturan Bupati Kulon Progo nomor 18 tahun 2018 tentang perubahan Peraturan Bupati Kulon Progo tentang Pedoman Pelaksanaan PMT-AS 2017. Dalam Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kulon Progo Nomor 280 tahun 2018 tentang pembentukan tim koordinasi Penyediaan Makanan Tambahan Anak Sekolah (PMT-AS) tahun 2018 yang mengharuskan adanya koordinasi dan kerja sama antar OPD diantaranya adalah Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, dan Dinas Pendidikan.

Beban kerja PNS yang berlebih menyebabkan kurang optimalnya pelaksanaan dan pengawasan PMT-AS. Dengan penambahan kegiatan dalam program PMT-AS ini kemudian menambah beban kerja PNS penanggung jawab program. Sebagai contoh adalah beban kerja nutrisisionis puskesmas dimana nutrisisionis puskesmas memiliki Satuan Kegiatan Pegawai dimana mereka harus menyelesaikan tugas tersebut sesuai jabatan mereka. Sehingga ketika ada tugas tambahan seperti yang terdapat dalam Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Sosial



Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kulon Progo Nomor 280 tahun 2018 tentang pembentukan tim koordinasi Penyediaan Makanan Tambahan Anak Sekolah (PMT-AS) tahun 2018 menambah beban kerja mereka (Fadhilah, 2018).

Akseptabilitas pemangku kebijakan terhadap sebuah program erat kaitannya dengan sinergi sebuah program terhadap kebijakan lain yang ada pada suatu daerah. Keterkaitan program-program atau kebijakan dibuat tersebut untuk menunjang atau meraih visi misi suatu daerah. Dalam program PMT-AS ini, pemanfaatan bahan makanan lokal mendukung kebijakan Bupati Kulon Progo yaitu Bela-Beli Kulon Progo. Kebijakan Bela-Beli Kulon Progo ini bertujuan untuk mewujudkan kemandirian ekonomi dengan membela dan membeli produk lokal. Jadi program PMT-AS ini selain untuk meningkatkan derajat kesehatan dan gizi siswa juga mendukung gerakan Bela-Beli Kulon Progo. Sinergi program yang mendukung tercapainya visi-misi daerah inilah yang menjadi faktor pendukung akseptabilitas pemangku kebijakan dalam menerima program PMT-AS (Sekhon *et al.*, 2017).

## KESIMPULAN

Dalam aspek akseptabilitas, para stakeholder yang terdiri dari pembuat kebijakan, pemangku kebijakan, dan pelaksana kegiatan yaitu mereka menyetujui dan mendukung dalam program PMT-AS berbasis makanan lengkap karena menilai bahwa program ini efektif untuk memecahkan masalah gizi, anggaran dana yang rasional, program dapat dilaksanakan di setting sekolah penerima dan adanya sinergi dengan program lain yang sesuai dengan visi misi kepala daerah.

## REFERENSI

- Bupati Kulon Progo. (2018). *Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kulon Progo Tahun Anggaran 2018*.
- Bottorff, J. L., Oliffe, J. L., Sarbit, G., Caperchione, C., Clark, M., Anand, A., & Howay, K. (2017). Assessing the feasibility, acceptability and potential effectiveness of an integrated approach to smoking cessation for new and expectant fathers: The Dads in Gear study protocol. *Contemporary Clinical Trials*, 54, 77–83. <https://doi.org/10.1016/j.cct.2017.01.00>
- Dinas Sosial Kabupaten Kulon Progo. (2018). Dinsos PPPA melaksanakan Program PMTAS 2018. Retrieved November 15, 2018, from <http://dinsos.kulonprogokab.go.id/article-330-dinsos-pppa-melaksanakan-program-pmtas-2018.html>
- Fadhilah, M. W. (2018). Analisis Beban Kerja dan kebutuhan Pegawai Negeri Sipil Pada Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bogor. *Bogor Agricultural*
- Fritz, H., Brody, A., & Levy, P. (2017). Assessing the feasibility, acceptability, and potential effectiveness of a behavioral-automaticity focused lifestyle intervention for African Americans with metabolic syndrome: The Pick two to Stick to protocol ☆. *Contemporary Clinical Trials Communications*, 7(January), 166–171. <https://doi.org/10.1016/j.conctc.2017.06.009>
- Hirsch-moverman, Y., Howard, A. A., Frederix, K., Lebelo, L., Hesselning, A., Nachman, S., ... El-sadr, W. M. (2017). The PREVENT study to evaluate the effectiveness and acceptability of a community-based intervention to prevent childhood tuberculosis in Lesotho: study protocol for a cluster randomized controlled trial, 1–11. <https://doi.org/10.1186/s13063-017-2184-0>
- Iswarawanti, D. N., Sulami, S., Ermayani, E., Habibie, Y., Februhartanty, J., & Handini, R. S. (2016). An Evaluation of The 2012-2015 Local Food-Based School Meal Program (LFBSM), Papua & Nusa Tenggara Timur Provinces, Indonesia, (September).
- Kartono, D., Haryadi, Y., Somali, L., Harjatmo, T. P., Indarto, S., Djoko, S., ... A.T. (2013). Evaluasi Program Pemberian Makanan Tambahan bagi Anak Sekolah (PMT-AS) Ringkasan Eksekutif. *Program Kemitraan Untuk Pengembangan Kapasitas Dan Analisis Pendidikan*.
- Lestari, R. T. (2013). Evaluasi Peran Program Pemberian Makanan Tambahan Anak Sekolah (PMT-AS) Terhadap Status Gizi, Kadar hemoglobin, dan Prestasi Belajar Siswa. *Badan Penelitian Dan Pengembangan (BALITBANG)*, 136.
- Northridge, M. E., Metcalf, S. S., Yi, S., Zhang, Q., & Gu, X. (2018). A Protocol for a Feasibility and

- Acceptability study of a Participatory , Multi-level , Dynamic Intervention in Urban outreach centers to Improve the oral Health of low-Income chinese Americans, *6*(February), 1–20. <https://doi.org/10.3389/fpubh.2018.00029>
- Sakona, A., Mtende, Y., Bui, T., Kennedy, A., Chunda, L., & Ngoma, J. (2017). Utility of WhatsApp Messenger to Promote Communication in a Medical Department in Malawi. *Annals of Global Health*, *83*(1), 136. <https://doi.org/10.1016/j.aogh.2017.03.304>
- Sekhon, M., Cartwright, M., & Francis, J. J. (2017). Acceptability of healthcare interventions: an overview of reviews and development of a theoretical framework. *BMC Health Services Research*, 1–13. <https://doi.org/10.1186/s12913-017-2031-8>
- Tanaka, N., & Miyoshi, M. (2012). School lunch program for health promotion among children in Japan, *21*(1), 155–158.